



► WAKIL RAKYAT

Dana Penanganan Stunting Rp120 Juta/Kelurahan

Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Jogja sekaligus Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyebut alokasi BKK Dana Keistimewaan untuk program penanganan *stunting* di Kota Jogja pada 2026 meningkat dari Rp100 juta pada 2025 menjadi Rp120 juta per kelurahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Eko Suwanto yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja dalam *Forum Group Discussion* (FGD) bertajuk *Strategi Atasi Stunting*, Kamis (15/1). "PDI Perjuangan berkomitmen penuh untuk mendorong kebijakan pembangunan benar-benar dialokasikan untuk program pro rakyat. Termasuk penurunan angka *stunting*. Selamat, ini semua berkat kerja keras ibu dan bapak semuanya," kata Eko Suwanto.

Dijelaskan Eko Suwanto, untuk memperkuat program pro rakyat di tingkat kelurahan, telah tersedia Peraturan Daerah No.3/2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

dan Kelurahan serta Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No.1/2024 tentang Kelembagaan.

Ia menegaskan perlunya segera dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat kalurahan dan kelurahan. "Penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan ini mutlak wajib dilakukan, salah satunya dengan mendorong segera dilakukan perubahan Perda Perangkat Daerah di Kota Jogja.

Ke depan, perlu segera dibentuk kelurahan sebagai organisasi perangkat daerah. Tujuannya agar APBD DIY, khususnya Dana Keistimewaan, dapat dialokasikan secara maksimal di tingkat kelurahan melalui BKK Kota Jogja. Selama ini, lurah dan jajaran sebagai unsur staf kemantren memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola anggaran di kelurahan," ujar alumnus Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM itu.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Kurniawan, mengapresiasi kinerja lurah dan perangkat di Kota Jogja dalam pelaksanaan serta pelaporan kegiatan penanganan *stunting*, di mana pada 2025 dialokasikan sebesar



Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, saat bertemu dengan warga di Kota Jogja, belum lama ini

Rp100 juta. "Terima kasih atas dedikasi dan disiplin menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Hasilnya, angka *stunting* di Kota Jogja turun. Selamat atas kerja keras bapak ibu lurah dan tim pendamping sehingga prevalensi *stunting* menurun signifikan," kata Kurniawan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja, Aan Iswanti, menyatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja kompak tim pendamping keluarga bersama lurah di masing-masing kemantren. "Kami rutin mendampingi dan melakukan intervensi pada kasus *stunting* serta

ibu hamil yang mengalami anemia. Alhamdulillah, angka *stunting* di Kota Jogja turun dari 12 persen menjadi 8,6 persen. Ini hasil kerja semua pihak," kata Aan Iswanti.

Kenaikan dana penanganan *stunting* menjadi Rp120 juta per kelurahan pada 2026 diharapkan memperkuat intervensi langsung di tingkat warga. Penguatan kelembagaan dan dukungan Dana Keistimewaan menjadi fondasi agar program penanganan *stunting* di Kota Jogja semakin terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kualitas generasi masa depan. (Yudhi Kusdiyanto/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005